

# **SOSIALISASI PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MENENTUKAN PRIORITAS ANGGARAN DI DESA MRIYUNAN**

**Windi Prananda<sup>1\*</sup>, Abdatul Maazzah<sup>2</sup>, Pemta Tiedeka<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik

<sup>3</sup>Dosen Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik

\*Email: [winanfield022@gmail.com](mailto:winanfield022@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pengelolaan dana desa menjadi aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Implementasi dana desa harus selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan hasil dari penggunaan dana tersebut. Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu menjadi penting untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Kendala yang sering dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dan tantangan dalam pelaporan yang sesuai standar akuntansi pemerintah. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pengawasan yang lebih ketat, dan penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Transparan, Akuntabilitas, Masyarakat.

## **ABSTRACT**

*Village fund management is a crucial aspect in development and community empowerment at the village level. The priority use of village funds is directed at activities that support infrastructure development, improving the quality of life of the community, and strengthening the village economy based on local potential. Implementation of village funds must be in line with community needs and government policies contained in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. Village financial reports function as a tool of accountability and transparency in managing village funds, which include income, expenditure and results from the use of these funds. Preparing accurate and timely financial reports is important to ensure village funds are used effectively and efficiently. Obstacles that are often faced include the limited capacity of village officials in financial management, minimal community participation in the planning process, and challenges in reporting in*

*accordance with government accounting standards. This study recommends increasing the capacity of village officials through training, tighter supervision, and strengthening the role of the community in the planning process and evaluating the use of village funds. In this way, it is hoped that village fund management can be more effective, targeted and support sustainable village development.*

**Keywords:** *Financial Report, Transparent, Accountability, Society*

## **PENDAHULUAN**

Kualitas laporan keuangan Desa merupakan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asa-asa, yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Pusat (Sagitarini et al., 2022).

Laporan keuangan ada dan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus dilakuknan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelolan anggaran desa (Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, 2018)

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana pada pasal 71 ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa prioritas pengelolaan keuangan desa 70% untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan (Tahir et al., 2021).

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik. Dalam hal ini kegiatan program kerja yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk membuat laporan keuangan yang rinci sehingga mudah dipahami oleh seluruh kalangan Masyarakat, karena mencakup transparansi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana desa.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan September 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan sebagai berikut :

### 1.1 Identifikasi Masalah

Mengetahui Kendala dan permasalahan yang terjadi di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu

### 1.2 Sosialisasi

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya laporan keuangan yang rinci sehingga mudah dipahami oleh seluruh kalangan Masyarakat, karena mencakup transparansi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat di Desa Mriyunan ini terdapat pencapaian untuk meningkatkan kesadaran dan menambah wawasan masyarakat serta pemerintah desa mengenai laporan keuangan yang rinci dan mudah dipahami. Tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai cara membuat laporan keuangan yang rinci sehingga mudah dipahami oleh seluruh kalangan Masyarakat, karena mencakup transparansi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa seringkali masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat. Laporan keuangan desa seringkali kurang transparan dan tidak mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang disajikan mungkin tidak lengkap, tidak jelas atau disembunyikan.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Mriyunan adalah bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pemerintah desa terkait pentingnya laporan keuangan yang rinci dan mudah dipahami. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam memahami cara membuat laporan keuangan yang transparan, guna mencegah kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana desa. Masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, meskipun

partisipasi mereka sebelumnya cenderung rendah akibat kurangnya sosialisasi dan akses informasi yang jelas serta transparan.

### **SARAN**

Dengan adanya penulisan artikel ini, penulis berharap pemerintah desa perlu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan adanya program sosialisasi ini, dapat membantu meningkatkan laporan keuangan desa dengan lebih transparan, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat agar kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat. Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mempermudah akses publik terhadap laporan keuangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, R. J. P. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Sagitarini, Y., Mukoffi, A., Wikardojo, S., & Himawan, S. (2022). Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 73–88. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367>
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.120>